BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR KEP-37/K/SU/2022

TENTANG

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

DAN AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

a. bahwa fokus pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, perlu diarahkan pada hal-hal yang bersifat strategis;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang menjadi perhatian Presiden dan para pemangku kepentingan, perlu disusun Program Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan dan Pembangunan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan untuk melaksanakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.

KETIGA : Agenda Prioritas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Sektor Strategis Pemerintah yang terdiri dari 7 (tujuh) sektor;
2. Tema Pengawasan Strategis yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) tema; dan

3. Topik Prioritas yang terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) topik.

KEEMPAT : Agenda Prioritas Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi 8 (delapan) tema prioritas daerah dan 68 (enam puluh delapan) topik prioritas daerah.

KELIMA : Informasi hasil pengawasan, sektor, tema, dan topik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bersifat minimal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan Agenda Prioritas Pemerintah dan Pemeritah Daerah.

KEENAM : Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-37/K/SU/2022
TENTANG
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2022

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2022

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
A Reformasi Pembangunan SDM	- Analisis atas desain kebijakan pemerintah terkait reformasi pembangunan SDM - Potret alokasi anggaran pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas SDM - Potret sebaran IPM regional dibandingkan dengan alokasi belanja daerah per kapita untuk pembangunan SDM - Analisis atas peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan (ringkasan dari klaster 1 dan 2) - Analisis atas peningkatan kualitas dan jangkauan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (ringkasan dari klaster 3) - Rekomendasi peningkatan kualitas belanja pembangunan SDM	D2				✓
1 Pendidikan	- Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor pendidikan serta prioritas penggunaannya - Analisis efektivitas peningkatan sarpras, Program BOS, dan Program Indonesia Pintar dalam mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan - Analisis keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi	D2			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	dalam mendorong serapan tenaga kerja					
a Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	- Analisis kebijakan/*grand design* peningkatan kualitas pendidikan nasional - Keselarasan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan nasional antar K/L dan pemda - Kesesuaian alokasi anggaran pendidikan dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional (potret prioritas anggaran) - Rekomendasi perbaikan kebijakan	D2		✓		
b Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	- Analisis perencanaan kebutuhan sarpras pendidikan - Ketepatan sasaran dan sebaran sarpras pendidikan - Akuntabilitas pelaksanaan peningkatan sarpras pendidikan - Analisis atas penyediaan dan pemanfaatan platform pembelajaran berbasis teknologi - Analisis efektivitas peningkatan sarpras dalam mendorong pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan - Permasalahan dan hambatan pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2			✓	
c Bantuan Operasional Sekolah	- Ketepatan alokasi dana BOS - Kelancaran penyaluran dana BOS - Ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS - Gambaran kebermanfaatan dana BOS dalam mencukupi kebutuhan operasional sekolah - Hambatan penyaluran dan pemanfaatan dana BOS - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2	✓			
d Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	- Analisis desain kebijakan KIP dan KIP-Kuliah - Validitas basis data penerima KIP & KIP Kuliah - Ketepatan sasaran dan sebaran pelaksanaan KIP & KIP Kuliah - Ketepatan jumlah dan waktu penyaluran KIP & KIP Kuliah	D2		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis efektivitas penyaluran KIP & KIP Kuliah dalam mendorong peningkatan APK dan APK Perguruan Tinggi - Permasalahan dan hambatan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
e Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	- Analisis kebijakan desain penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi - Progres penyesuaian kurikulum SMK, Program Diploma, dan Pelatihan Vokasi dengan kebutuhan industry - Progres program peningkatan pendidikan SMK ke D2 jalur cepat dan Prodi D3 ke D4 - Progres penyelarasan pengembangan riset terapan dan inovasi dengan kebutuhan industry - Analisis efektivitas pelaksanaan penguatan vokasi dalam mendorong penyerapan tenaga kerja - Analisis pemanfaatan hasil produk riset terapan - Permasalahan dan hambatan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2		✓		
2 Kesehatan	a) Simpulan terkait efektivitas penanganan covid-19 - Analisis kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi endemi Covid-19 dan mengantisipasi risiko lonjakan kasus - Efektivitas dan kendala implementasi penanganan Covid-19 b) Simpulan terkait reformasi kesehatan nasional - Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor kesehatan serta prioritas penggunaannya - Analisis keselarasan program pemerintah untuk menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan - Analisis kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	D2			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
a Penanganan Covid-19	a) Vaksinasi: - Progres Capaian Vaksinasi (Dosis 2 vaksin dan Booster bagi PBI dan Mandiri) - Efisiensi atas penyuntikan vaksin dan vaksin yang tidak termanfaatkan (*wastage*) - Percepatan dan pemerataan vaksinasi - Ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan kualitas, dan ketepatan administrasi - Analisis atas ketersediaan stok vaksin - Progres dan akuntabilitas pengembangan vaksin dalam negeri - Distribusi vaksinasi (sejak alokasi, penetapan, distribusi, penyimpanan di gudang) - Akuntabilitas keuangan (sejak pengadaan s.d. pembayaran vaksin) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2	✓	✓	✓	✓
	b) Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan - Progres capaian penyaluran insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah - Penyelesaian insentif nakes yang belum terbayarkan tahun 2020 s.d. 2021 - Ketersediaan anggaran insentif nakes di pemerintah pusat dan daerah - Ketepatan sasaran dan ketepatan jumlah penerima insentif - Permasalahan dan hambatan penyaluran insentif - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2	✓	✓	✓	✓
	c) Pembayaran Klaim Rumah Sakit - Progres capaian pembayaran klaim RS Tahun 2022 dan tunggakan klaim tahun 2020 s.d. 2021 - Progres capaian penyelesaian *dispute* klaim RS Tahun 2020 s.d. 2022	D2	✓	✓	✓	✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis terhadap tingkat kejadian, nilai, dan dampak *dispute* - Kecukupan alokasi anggaran - Ketepatan jumlah dan waktu pembayaran - Keberlanjutan (*sustainability*) pembiayaan penanganan pasien Covid-19 (*cost-sharing*) - Indikasi kecurangan pembayaran klaim RS - Permasalahan dan hambatan pembayaran klaim RS - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
	d) PBJ pada penanganan Covid-19 (alat testing/tracing, almatkes, obat, dan faskes) - Ketepatan perencanaan kebutuhan - Kewajaran harga - Ketepatan jumlah dan kualitas - Ketepatan distribusi - Indikasi kecurangan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2	✓	✓	✓	✓
	e) Perubahan Perilaku, Komunikasi Publik dan Satu Data BLC - Analisis kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi endemi Covid-19 dan mengantisipasi risiko lonjakan kasus	D2		✓		
b *Stunting*	- Ketepatan desain intervensi penurunan stunting, beserta konvergensinya - Akuntabilitas keuangan dan kinerja - Progres capaian penurunan *stunting* - Permasalahan dan hambatan pengentasan *stunting* - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2			✓	
c Jaminan Kesehatan Nasional	- Akuntabilitas keuangan bantuan iuran BPJS Kesehatan - Ketepatan sasaran bantuan iuran BPJS Kesehatan - Analisis atas capaian *Universal Health Coverage*	D2		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Tata kelola kepesertaan JKN - Utilisasi layanan oleh masyarakat - *Financial sustainability* program JKN - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
d Reformasi Sistem Kesehatan	a) Layanan Primer - Akuntabilitas keuangan dan tata kelola Gerakan Masyarakat Sehat - Kondisi kapasitas, kapabilitas, dan aksesibilitas layanan primer - Kualitas atas layanan kesehatan primer - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2				✓
	b) Layanan Rujukan - Kecukupan sarpras layanan rujukan (tempat tidur dan lainnya) - Kualitas layanan dan akreditasi Rumah Sakit - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2				✓
	c) Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes - Ketergantungan industri terhadap impor - Kepatuhan pelaksanaan program TKDN - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2				✓
	d) Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan - Kondisi sebaran tenaga Kesehatan - Kualitas tenaga Kesehatan - Akuntabiitas dan tata kelola atas pemerataan tenaga Kesehatan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2				✓
3 Perlindungan Sosial	- Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor perlindungan sosial serta prioritas penggunaannya - Kualitas tata kelola basis data penerima bansos	D2		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis kecukupan cakupan bansos - Analisis atas mekanisme penentuan jenis bansos, target penerima, tingkat aksesibilitas wilayah, serta kecepatan penyaluran yang diharapkan - Analisis efektivitas bauran kebijakan perlindungan sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin - Rekomendasi strategis terkait perbaikan kebijakan/implementasi perlinsos					
a Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	- Progres perbaikan data DTKS - Progres integrasi DTKS dan basis data lain - Analisis atas mekanisme integrasi data bansos - Permasalahan dan hambatan perbaikan data bansos - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi tata kelola data bansos	D2	✓			
b Pengembangan Skema Perlinsos Adaptif	Ketepatan mengenai kebijakan adaptasi jangkauan perlindungan sosial, meliputi: 1) Mekanisme asesmen berkala kecukupan jangkauan perlindungan sosial 2) Mekanisme perluasan jangkauan penerima bansos 3) Kebijakan mengenai rencana kontijensi perlindungan sosial dalam hal terjadi peningkatan kedaruratan	D2		✓		
c Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	- Analisis efektivitas bantuan dalam menjaga/meningkatkan daya beli masyarakat penerima bantuan - Tata kelola basis data penerima (DTKS & data lain) - Tata kelola program bansos (a.l. meliputi perencanaan, penetapan penerima, penyaluran, penunjukan penyalur, kualitas penyaluran/pelatihan, dst) - Ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran - Permasalahan dan hambatan penyaluran - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D2		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
d Implementasi Bansos APBD	- Analisis efektivitas Bansos Pemda dalam menjaga/meningkatkan daya beli masyarakat penerima bantuan - Kualitas dan pemutakhiran data, serta integrasi dengan data bansos lain - Ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran - Permasalahan dan hambatan penyaluran - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D3		✓		
e Implementasi Bansos APBDesa	- Analisis efektivitas BLT-DD dalam menjaga/meningkatkan daya beli masyarakat penerima bantuan - Kualitas dan pemutakhiran data, serta integrasi dengan data bansos lain - Ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran - Permasalahan dan hambatan penyaluran - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D3		✓		
B Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	- Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas - Akuntabilitas keuangan dan kinerja - Potret penyelesaian pembangunan infrastktur dan konektivitas - Permasalahan/hambatan utama dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas - Gambaran inefisiensi - Modus kecurangan dan rekomendasi mitigasinya - Rekomendasi penguatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas	D1				✓
1 Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	- Potret infrastruktur pelayanan dasar (analisis regional dan progres pemenuhan) - Simpulan keselarasan rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan dukungannya - Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	D1				✓

Segmen/Klaster/Topik		Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
		dalam mendorong pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar					
a	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun)	- Ketepatan Kebijakan dan *Grand Design* yang mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat - Ketepatan perencanaan pembangunan perumahan rakyat - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres capaian pembangunan perumahan rakyat) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi	D1				✓
b	Infrastruktur SPAM	- Ketepatan Kebijakan dan penetapan pembangunan Infrastruktur SPAM - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres capaian pembangunan infrastruktur SPAM) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Kesesuaian kapasitas produksi dan penyaluran dengan kebutuhan air bersih - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi	D1				✓
c	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	- Ketepatan kebijakan dan penetapan pembangunan infrastruktur SPAL - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres capaian pembangunan infrastruktur SPAL) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Simpulan Efektivitas SPAL dalam meningkatkan kualitas air baku dan mengurangi pencemaran air - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi	D1				✓
2	Penguatan Infrastruktur untuk Energi dan Pangan	- Potret infrastruktur untuk energi dang pangan (analisis regional dan progres pemenuhan) - Simpulan keselarasan rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur untuk energi dan pangan dengan dukungannya	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur untuk energi dan pangan dalam mendorong pemenuhan kebutuhan energi dan pangan					
a Infrastruktur Jaringan Gas	- Ketepatan kebijakan dan penetapan pembangunan Jaringan Gas - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres pembangunan infrastruktur jaringan gas) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Simpulan efektivitas Jargas dalam menekan subsidi elpiji 3kg dalam upaya efisiensi keuangan negara - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi	D1			✓	
b Infrastruktur Jaringan Irigasi	- Keterhubungan dan keselarasan program pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi pusat dan daerah (primer, sekunder, tersier) - Keselarasan program pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dengan lahan produksi pertanian - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres pembangunan infrastruktur jaringan irigasi) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Analisis desain jaringan irigasi dan keterkaitannya dengan *food estate*/ketahanan pangan - Simpulan Efektivitas jaringan irigasi serta pencapaian ketahanan pangan/*food estate* - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi	D1			✓	
c Infrastruktur Jaringan Listrik	- Ketepatan kebijakan dan penetapan pembangunan jaringan listrik nasional - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres pembangunan jaringan listrik) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur jaringan listrik dalam pencapaian kebutuhan listrik nasional - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi					
3 Penguatan Infrastruktur untuk Produktivitas, Konektivitas dan Mobilitas	- Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas - Akuntabilitas keuangan dan kinerja - Potret penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas - Permasalahan/hambatan utama dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas - Gambaran inefisiensi - Modus kecurangan dan rekomendasi mitigasinya - Rekomendasi penguatan alternatif pembiayaan pembangunan	D1				✓
a Pembangunan Jalan	- Ketepatan kebijakan pembangunan jalan nasional (termasuk penetapan target pembangunan) - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Kesinambungan pembangunan jalan antar daerah secara terintegrasi (termasuk pembangunan jalan dalam mendukung *Major Project* lain, misalnya Destinasi Pariwisata Prioritas) - Keselarasan pembangunan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota - Potensi inefisiensi belanja sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian belanja - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi	D1				✓
b Pembangunan Jembatan	- Ketepatan perencanaan pembangunan jembatan (termasuk penetapan target pembangunan)	D1				✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jembatan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/ kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi					
c Infrastruktur Jalan Tol	- Ketepatan perencanaan pembangunan jembatan - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan tol, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Utilisasi infrastruktur jalan tol sesuai peruntukan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi	D1				✓
d Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	- Ketepatan perencanaan pembangunan jalur kereta api - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan, (ii) capaian *Track Quality Index* dan (iii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Kesinambungan pembangunan jalur kereta api antar daerah secara terintegrasi - Utilisasi infrastruktur jalur kereta api sesuai peruntukan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi	D1				✓
e Pembangunan Bandara	- Ketepatan perencanaan pembangunan bandara - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan bandara, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Konektivitas Infrastruktur pendukung (Aksesbilitas Jalan, Jalan Tol) - Utilisasi pembangunan bandara sesuai peruntukan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/ kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi	D1				✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
f Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	- Ketepatan perencanaan pembangunan infrastruktur Pelabuhan - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Konektivitas Infrastruktur pendukung (Aksesbilitas Jalan, Jalan Tol) - Utilisasi pembangunan infrastruktur pelabuhan sesuai peruntukan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/ kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi	D1				✓
4 Pemerataan Infrastruktur Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	- Potret ketimpangan akses internet antar daerah - Analisis atas rancangan/peta jalan pemerataan akses TIK - Potret alokasi anggaran pemerintah untuk pemerataan infrastruktur akses TIK - Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur TIK dalam mendorong peningkatan pemerataan akses, termasuk akses terhadap internet	D2			✓	
a Penyediaan BTS	- Ketepatan kebijakan dan perencanaan pemerataan pembangunan BTS - Progres dan hambatan pembangunan BTS - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres pembangunan) - Pemenuhan dukungan pemda dalam penyediaan BTS (terutama penyediaan lahan) - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi	D2			✓	
b Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	- Ketepatan kebijakan dan rancangan pemerataan akses dan kapasitas jaringan internet - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres penyediaan dan kapasitas jaringan internet) - Analisis dukungan TKDD untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital - Progres dan hambatan penyediaan akses dan kapasitas jaringan internet - Analisis pemanfaatan akses internet untuk mendukung layanan public	D2			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi					
5 Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	- Gambaran perkembangan implementasi KPBU (jumlah dan sebaran per sektor) - Kecukupan kualitas kebijakan dan tata kelola untuk mendukung optimalisasi KPBU - Analisis *financial sustainability* atas proyek KPBU - Analisis optimalisasi pemanfaatan KPBU (perbandingan antara realisasi implementasi KPBU dengan sebaran potensi proyek yang dapat dibiayai dengan KPBU) - Identifikasi hambatan penyelenggaraan - Rekomendasi percepatan dan optimalisasi KPBU	D1	✓			
C Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	- Potret postur APBN/Daerah/Desa TA 2022 - Analisis alokasi prioritas dan kualitas belanja pemerintah (pusat, daerah, desa) TA 2022 - Permasalahan/hambatan utama dalam percepatan belanja pemerintah pusat/daerah/desa - Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan ketidakefisienan belanja - Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan - Kontribusi pengawasan BPKP terhadap keuangan negara - Rekomendasi perbaikan kebijakan akuntabilitas keuangan negara/daerah/desa	D1				✓
1 Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat	- Analisis postur dan realisasi APBN 2022 - Simpulan disiplin belanja pemerintah - Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi - Simpulan kinerja pendapatan negara (dibandingkan dengan target dan potensi)	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBN					
a Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L	- Potensi Efektivitas dari sisi Perencanaan dan Penganggaran - Potensi Efisiensi dari sisi Perencanaan dan Penganggaran - Permasalahan dalam Perencanaan dan Penganggaran - Rekomendasi atas perbaikan sistem Perencanaan dan Penganggaran	D1		✓		
b Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa K/L	Triwulan I - Analisis postur belanja K/L - Analisis rencana penarikan dana/*disbursement plan* dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2022 - Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ - Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ - Rekomendasi percepatan penyerapan Triwulan II dan III - Analisis ketepatan waktu serapan belanja per triwulan II dan III dengan proyeksinya/RPD - Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ - Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ - Rekomendasi percepatan penyerapan Triwulan IV - Analisis tren penyerapan pendapatan dan belanja - Analisis kontribusi belanja pada pertumbuhan ekonomi - Rekomendasi perbaikan pelaksanaan belanja dan PBJ K/L	D1	✓	✓	✓	✓
c Penguatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat (Fokus pada Perlindungan Sosial)	- Analisis ketepatan desain kebijakan perlindungan sosial - Analisis tren alokasi prioritas belanja pemerintah pada perlindungan sosial - Analisis keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas perlindungan sosial - Rekomendasi penguatan kualitas belanja pemerintah	D2		✓		

Segmen/Klaster/Topik		Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
d	Tata Kelola Pendapatan Negara	- Potret kebijakan pendapatan negara - Ketepatan penetapan target Pendapatan Negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dan PNBP) dibandingkan potensinya - Potret tren pendapatan negara (analisis kontribusi per jenis pendapatan dan sektoral) - Capaian realisasi pendapatan negara dibandingkan target - Identifikasi hambatan dalam pengumpulan pendapatan negara, termasuk hambatan regulasi - Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.	D1		✓		
2	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah	- Analisis postur dan realisasi APBD 2022 (analisis regional dan sektoral) - Simpulan disiplin belanja pemerintah daerah - Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi - Simpulan kinerja PAD (dibandingkan dengan target dan potensi) - Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBD	D3			✓	
a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	- Potensi Efektivitas dari sisi Perencanaan dan Penganggaran - Potensi Efisiensi dari sisi Perencanaan dan Penganggaran - Permasalahan dalam Perencanaan dan Penganggaran - Rekomendasi atas perbaikan sistem Perencanaan dan Penganggaran	D3	✓			
b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Triwulan I - Analisis postur APBD - Analisis kemandirian fiscal - Analisis prioritas alokasi belanja daerah - Analisis dukungan alokasi keuangan daerah untuk PC-PEN - Analisis anggaran kas/cash disbursement plan dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2022 - Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ	D3	✓	✓	✓	✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ - Rekomendasi percepatan penyerapan. Triwulan II dan III - Analisis ketepatan waktu serapan belanja per triwulan II dan III dengan proyeksinya - Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ - Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ. - Rekomendasi percepatan penyerapan. Triwulan IV - Analisis tren penyerapan pendapatan dan belanja - Analisis kontribusi belanja pada pertumbuhan ekonomi - Rekomendasi perbaikan pelaksanaan belanja dan PBJ Daerah					
c Optimalisasi PAD	- Potret kebijakan pemda terkait PAD - Ketepatan penetapan target PAD dibandingkan potensinya - Potret tren realisasi PAD (analisis kontribusi per jenis pendapatan dan sektoral) - Capaian realisasi PAD dibandingkan target - Identifikasi hambatan dalam pengumpulan PAD, termasuk hambatan regulasi - Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.	D3		✓		
d Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer *(fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)*	- Analisis ketepatan kebijakan pemda terkait sektor pendidikan - Potret tren dana transfer ke daerah untuk sektor pendidikan - Postur alokasi anggaran dan analisis tren prioritas/fokus belanja pemerintah untuk sektor pendidikan (pada 34 provinsi dan 508 kab/kota) - Analisis efektivitas intervensi pemerintah daerah pada sektor pendidikan - Identifikasi permasalahan/hambatan - Rekomendasi penguatan kualitas belanja pemerintah daerah	D3			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
e Penguatan Kualitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Papua dan Papua Barat)	- Potret tren dana otonomi khusus ke daerah - Analisis Ketepatan kebijakan terkait dana otonomi khusus - Analisis tren prioritas penggunaan dana otonomi khusus oleh pemda - Efektivitas penggunaan dana otonomi khusus - Rekomendasi penguatan kebijakan dan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus	D3			✓	
f Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	- Analisis dukungan alokasi keuangan daerah untuk PC-PEN - Analisis atas kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong pengalokasian keuangan daerah untuk PC-PEN - Postur alokasi anggaran dan analisis tren prioritas/fokus belanja pemda untuk PC-PEN - Progres realisasi belanja PC-PEN yang didanai APBD - Hambatan dalam realisasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D3	✓	✓	✓	✓
3 Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Desa	- Analisis ketepatan bauran kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait desa - Potret alokasi prioritas belanja desa secara nasional tahun 2022 - Analisis efektivitas keuangan desa - Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan Keuangan Desa	D3			✓	
a Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	1) Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi: - Analisis desain kebijakan prioritas penggunaan dana desa - Analisis tren penggunaan dana desa - Keselarasan perencanaan dengan prioritas penggunaan dana desa - *Mapping* kesiapan implementasi SDGs Desa	D3	✓			
	2) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa, meliputi: - Analisis tren target dan realisasi sumber keuangan desa - Analisis tren pemanfaatan keuangan desa - Identifikasi permasalahan akuntabilitas keuangan desa (terutama	D3	✓	✓	✓	✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan) - Hambatan dalam pengelolaan keuangan desa - Analisis efektivitas keuangan desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa					
b Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	- Analisis atas kebijakan tata kelola aset desa - Potret pengelolaan aset desa (pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan) - Identifikasi permasalahan/hambatan terkait manajemen aset desa - Efektivitas aset desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa - Rekomendasi perbaikan tata kelola aset dan optimalisasi pemanfaatan aset desa	D3	✓			
4 Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan	- Simpulan atas akuntabilitas dan kualitas tata kelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD - Simpulan atas kontribusi BUMN/BUM/BLU/BLUD bagi pembangunan nasional/pemenuhan kebutuhan masyarakat	D4			✓	
a BUMN	- Kualitas *Governance, Risk and Control* BUMN - Analisis kinerja keuangan, operasional dan fiskal BUMN - Analisis atas tingkat kompetitif, efisiensi dan transparansi BUMN pada industri masing-masing - Kontribusi BUMN terhadap pembangunan (kinerja pelaksanaan penugasan pemerintah) - Analisis *going concern* BUMN - Indikasi *fraud* di BUMN - Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan aset - Permasalahan dan hambatan BUMN dalam pelaksanan bisnis - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D4			✓	
b BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	- Kualitas *Governance, Risk and Control* - Analisis kinerja keuangan dan operasional - Indikasi *fraud*	D4		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanan bisnis - Untuk BU Jasa Air: Analisis kontribusi/kinerja BU Jasa Air dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat - Untuk BPD: (i) Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, (ii) Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
c BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	- Analisis peningkatan kualitas layanan paska penerapan status BLU/BLUD - Analisis kinerja keuangan dan operasional - Indikasi *fraud* - Permasalahan dan hambatan BLU/BLUD dalam pelaksanaan bisnis - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D4			✓	
D Pemulihan Ekonomi	- Potret kondisi perekonomian nasional - Analisis ketepatan bauran kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi - Permasalahan/hambatan utama dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi - Modus-modus penyimpangan dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi - Analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi - Rekomendasi perbaikan kebijakan	D1				✓
1 Stimulus dan Dukungan terhadap UMKM	- Tata kelola basis data UMKM - Coverage UMKM yang mendapat bantuan pemerintah (dibandingkan dengan populasi) - Efektivitas kebijakan perlindungan UMKM	D1		✓		✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
a Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	- Tata kelola basis data penerima (verifikasi pendaftar, pengujian duplikasi, dst.). - Akuntabilitas penyaluran (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu, dst.) - Efektivitas penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1		✓		✓
b Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	1) KUR dan Subsidi Bunga/Margin Baik Reguler maupun Tambahan - Ketepatan kebijakan pemberian KUR dan Kredit Lainnya - Tata kelola basis data penerima (verifikasi pendaftar, pengujian duplikasi, dll). - Akuntabilitas penyaluran, baik reguler (penerima KUR existing) maupun tambahan (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dst.) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi - Dampak KUR dan Kredit Lainnya terhadap pelaku usaha	D1		✓		✓
	2) Non KUR dan Subsidi Bunga/Margin - Ketepatan kebijakan pemberian Subsidi Bunga KUR dan Subsidi Margin - Tata kelola basis data penerima (verifikasi pendaftar, pengujian duplikasi, dll). - Akuntabilitas penyaluran (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dst.) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi - Dampak Subsidi Bunga KUR terhadap pelaku usaha	D1		✓		✓
2 Stimulus dan Dukungan terhadap Korporasi	- Analisis ketepatan bauran kebijakan pemberian stimulus dan dukungan terhadap korporasi, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi nasional	D1	✓			

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis efektivitas implementasi bauran kebijakan					
a Penempatan Dana	- Potret penempatan dana - Ketepatan penggunaan dana yang ditempatkan pemerintah - Kinerja penyaluran kredit dari penetapan dana pemerintah - Efektivitas penempatan dana untuk meningkatkan perluasan/restrukturisasi kredit - Pengaruh perluasan/restrukturisasi kredit terhadap kondisi kesehatan bank mitra - Potret permasalahan dan risiko - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1	✓			
b Penjaminan	- Potret kebutuhan dan cakupan kredit yang dilakukan penjaminan - Ketepatan sasaran dan nilai penjaminan - Akuntabilitas imbal jasa penjaminan kredit - Analisis efektivitas penjaminan - Potret permasalahan dan risiko - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1	✓			
c Penyertaan Modal Negara pada BUMN	- Analisis ketepatan Kebijakan PMN kepada BUMN (termasuk penetapan target penerima dan besaran PMN) - Progres penyaluran dan penggunaan dana PMN - Kesesuaian penggunaan dana dengan rencana - Analisis efektivitas PMN dalam mendorong peningkatan kinerja dan kesehatan keuangan BUMN - Potret permasalahan dan risiko - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1	✓			
3 Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	- Potret kemudahan berusaha dan berinvestasi - Efektivitas kebijakan kemudahan investasi dan usaha	D1		✓		
a Stimulus dan Insentif Perpajakan	- Analisis ketepatan kebijakan stimulus dan insentif perpajakan - Analisis kesesuaian implementasi kebijakan - Tata kelola stimulus dan insentif perpajakan	D1		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk capaian pemanfaatan stimulus dan insentif perpajakan - Hambatan dan permasalahan - Risiko yang belum termitigasi - Analisis efektivitas stimulus dan instentif usaha untuk meningkatkan minat dan kemudahan berusaha - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
b Kemudahan Perizinan (OSS)	- Analisis ketepatan kebijakan kemudahan perizinan - Analisis kesesuaian implementasi kebijakan - Tata kelola OSS untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk perkembangan implementasi OSS (kesesuaian pelaksanaan dengan Norma, standar, prosedur, dan kriteria, dst) - Analisis keselarasan penerapan OSS antar K/L/D - Kendala/Hambatan implementasi OSS - Efektivitas OSS (termasuk dampak OSS terhadap peningkatan kemudahan berusaha, seperti penurunan waktu pengurusan perizinan, peningkatan indeks kemudahan berusaha, dll.) - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1		✓		
4 Perbaikan Neraca Perdagangan	- Analisis mengenai kondisi yang mendukung dan menghambat perbaikan neraca perdagangan - Keselarasan kebijakan terkait ekspor dan impor antar K/L dan daerah - Efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam memperbaiki neraca perdagangan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1		✓		
a Peningkatan Ekspor	- Ketepatan kebijakan pengembangan ekspor nasional (intervensi pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor) - Analisis kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pertumbuhan ekspor	D1		✓		

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis efektivitas intervensi pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor - Hambatan dan permasalahan - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
b P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	- Ketergantungan industri terhadap impor - Kepatuhan atas pelaksanaan program TKDN - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1		✓		✓
5 Pariwisata	- Analisis ketepatan kebijakan pengembangan pariwisata nasional, khusunya dalam konteks pemulihan ekonomi - Analisis kesesuaian implementasi dengan kebijakan - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk progres pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional - Analisis efektivitas program pengembangan pariwisata dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	D1				✓
a Pengembangan DPSP	- Analisis ketepatan perencanaan/desain pengembangan DPSP - Evaluasi tata kelola pengembangan destinasi pariwisata - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk progres penyelesaian destinasi pariwisata - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1				✓
b Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa	- Analisis ketepatan kebijakan bantuan stimulus kepada sektor parekraf - Analisis validitas basis data sasaran penerima - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan bantuan - Akuntabilitas penyaluran dana	D1				✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
Pandemi Covid-19	- Analisis efektivitas penyaluran Bantuan dalam membantu pelaku usaha parekraf - Permasalahan dan hambatan penyaluran - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
6 Pembangunan Energi Berkelanjutan	- Analisis ketepatan kebijakan pembangunan energi nasional secara berkelanjutan - Analisis kesesuaian implementasi kebijakan - Analisis kecukupan pertumbuhan suplai energi terhadap pertumbuhan ekonomi - Keselarasan program untuk mencapai target/keberhasilan pembangunan energi berkelanjutan (bauran energi)	D1	✓			
a Transformasi Energi Baru Terbarukan	- Keselarasan kebijakan EBT dengan target pengurangan Gas Rumah Kaca - Capaian target pencapaian bauran EBT - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Akuntabilitas pelaksanaan program, termasuk potensi inefisiensi belanja - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1	✓			
b Subsidi Listrik, BBM dan Gas	- *Sustainability* rancangan dan implementasi kebijakan subsidi - Efisiensi industri serta kaitannya dengan ketepatan kebijakan subsidi - Ketepatan perhitungan subsidi Listrik, BBM dan LPG - Potensi inefisiensi belanja subsidi Listrik, BBM dan LPG - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1	✓			
E Ketahanan Pangan	- Potret ketahanan pangan (a.l. mencakup analisis regional, gambaran pemenuhan kebutuhan pangan nasional, perkembangan diversifikasi pangan, kecukupan dan kelancaran distribusi pangan, dst.) - Analisis ketepatan kebijakan/grand design peningkatan ketahanan	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	pangan nasional, termasuk keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah - Analisis kesesuaian prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah (pusat dan daerah) dengan strategi peningkatan ketahanan pangan - Analisis efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan					
1 Peningkatan Produksi Bahan Pangan	- Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan produksi bahan pangan - Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan - Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan variasi bahan pangan - Permasalahan dan hambatan - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
a Tata Kelola Subsidi Pupuk	- Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan kebijakan subsidi pupuk nasional - Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan - Tata kelola data pupuk nasional (termasuk data kebutuhan dan produksi) - Ketepatan penetapan harga pupuk bersubsidi (termasuk analisis efisiensi industri) - Ketepatan penetapan alokasi subsidi pupuk - Ketepatan tata kelola distribusi pupuk (ketepatan sasaran, waktu, dan jumlah serta mekanisme pengawasan) - Ketepatan perhitungan realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi - Potensi inefisiensi belanja subsidi pupuk - Risiko yang belum termitigasi	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Simpulan efektivitas pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
b Tata Kelola Program Benih Unggul	- Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan kebijakan program benih unggul - Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan - Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah - Tata kelola data kebutuhan dan penyaluran benih unggul - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Simpulan efektivitas pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
c Tata Kelola Program Bibit Ternak	- Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan kebijakan program bibit ternak - Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan - Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah - Tata kelola data kebutuhan dan penyaluran bibit ternak - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Simpulan efektivitas pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
2 Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	- Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan dukungan peralatan produksi pangan - Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	kebijakan - Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan variasi bahan pangan - Permasalahan dan hambatan - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
a Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	- Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan kebijakan dukungan peralatan produksi pertanian - Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan - Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah - Tata kelola data kebutuhan dan penyaluran Dukungan Peralatan Produksi Pertanian - Tata kelola penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Simpulan efektivitas pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
b Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	- Analisis ketepatan dan *sustainability* rancangan kebijakan program dukungan peralatan produksi perikanan - Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan - Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah - Tata kelola data kebutuhan dan penyaluran Dukungan Peralatan Produksi Perikanan - Tata kelola penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran,	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	waktu, kualitas, jenis, dan administrasi) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Simpulan efektivitas pelaksanaan program - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
3 Peningkatan Infrastruktur Pangan	- Gambaran alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pangan - Potret sebaran dan kondisi infrastruktur pangan (analisis regional) - Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur pangan dalam mendorong peningkatan produksi pangan - Gambaran umum hambatan dan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur pangan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
a Infrastruktur Bendungan dan Jaringan Irigasi*) Keterangan: Menggunakan Informasi pada Segmen B, Klaster 2, Topik b)	- Keterhubungan dan keselarasan program pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi pusat dan daerah (primer, sekunder, tersier) - Keselarasan program pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dengan lahan produksi pertanian - Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres pembangunan infrastruktur jaringan irigasi) - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Analisis desain jaringan irigasi dan keterkaitannya dengan *food estate*/ketahanan pangan - Simpulan Efektivitas jaringan irigasi serta pencapaian ketahanan pangan/*food estate* - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi	D1			✓	
b Infrastruktur Balai Benih Tanaman Pangan	- Keterhubungan dan keselarasan kebijakan pembangunan Balai Benih Tanaman Pangan dengan dukungannya (pusat dan daerah)	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Akuntabilitas keuangan dan kinerja pembangunan infrastruktur (termasuk ketepatan jumlah, waktu, kualitas, administrasi) - Pemanfaatan Balai Benih dalam penyediaan benih tanaman pangan yang berkualitas (termasuk analisis mengenai jumlah dan kualitas benih, serta penggunaan benih oleh petani) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Simpulan efektivitas pelaksanaan program terutama dalam mendukung produksi pangan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
c Infrastruktur Pelabuhan Perikanan	- Keterhubungan dan keselarasan program pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan dukungannya (pusat dan daerah) - Akuntabilitas keuangan dan kinerja pembangunan infrastruktur (termasuk ketepatan jumlah, waktu, kualitas, administrasi) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Simpulan efektivitas pelaksanaan program terutama dalam mendukung produksi pangan sektor perikanan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
4 Kawasan Sentra Produksi Pangan	- Analisis ketepatan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan kontribusi sentra pangan dalam produksi dan diversifikasi pangan nasional - Analisis keselarasan implementasi dengan rancangan kebijakan - Capaian dan proyeksi kontribusi sentra pangan dalam peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani/nelayan - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
a *Food Estate*	- Analisis ketepatan kebijakan pengembangan food estate (*on-farm* dan *off-farm*), serta keselarasan antar K/L dan Pemda - Kualitas tata kelola lahan pangan untuk *food estate* (terkait dengan	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	status lahan, pembagian lahan, dst) - Keselarasan kegiatan *food estate* dengan kegiatan dukungan (Irigasi, waduk, bendungan, embung, sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.) - Progres penyelesaian pembangunan *food estate* - Pencapaian target produksi dan produktivitas pangan di kawasan *food estate* - Efektivitas sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah hasil produksi, distribusi dan pemasaran berbasis digital - Efektivitas Korporasi petani (berdaya guna untuk meingkatkan kesejahteraan petani) - Hambatan dan permasalahan pelaksanaan *food estate* - Risiko pelaksanaan *food estate* yang belum termitigasi - Simpulan atas efektivitas pelaksanaan *food estate* - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi *food estate*					
b Lumbung Perikanan Nasional	- Analisis ketepatan kebijakan pengembangan lumbung perikanan nasional baik *on-fishing and off-fishing*, serta keselarasan antar K/L dan Pemda - Gambaran progres capaian program lumbung ikan nasional - Keselarasan kegiatan lumbung ikan nasional dengan kegiatan dukungan (kapal perikanan, alat penangkap ikan ramah lingkungan, infrastruktur pelabuhan perikanan, balai benih, dll) - Hambatan dan permasalahan pelaksanaan lumbung ikan nasional - Risiko pelaksanaan lumbung ikan nasional yang belum termitigasi - Simpulan atas efektivitas pelaksanaan lumbung ikan nasional - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
5 Tata Kelola Cadangan Pangan	- Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan cadangan pangan - Analisis efektivitas tata kelola cadangan pangan pemerintah pusat dan	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	daerah dalam menghadapi risiko kekurangan pangan nasional - Analisis efektivitas tata kelola cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional					
a Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	- Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah pusat atas 11 bahan pangan pokok - Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.) - Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi) - Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas - Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D1			✓	
b Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	- Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah atas 11 bahan pangan pokok - Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.) - Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan daerah (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi) - Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas - Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D3			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
F Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	- Potret kualitas tata kelola K/L/D - Permasalahan/hambatan utama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih - Kelemahan-kelemahan utama dalam penerapan pengendalian intern pada penyelenggaraan pemerintahan - Potret kecukupan pengendalian risiko kecurangan pada instansi pemerintah - Analisis efektivitas penyelenggaraan GRC dengan peningkatan kinerja K/L/D	D3				✓
1 Penguatan Tata Kelola	- Simpulan capaian penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah (penguatan RB, SPIP, dan Kapabiltias APIP) - Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintah	D3				✓
a Reformasi Birokrasi	- Analisis atas kebijakan/*roadmap* RB Nasional - Kesesuaian pelaksanaan RB dengan strategi pengembangan RB Nasional - Profil risiko pelaksanaan RB Nasional - Analisis dampak pelaksanaan RB Nasional di K/L/D yang terlibat terhadap kemudahan berusaha - Rekomendasi percepatan pelaksanaan RB nasional dikaitkan dengan kemudahan berusaha - Hambatan pelaksanaan RB di setiap K/L/D	D2			✓	
b SPIP	- Simpulan atas kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pada instansi pemerintah pusat dan daerah (a.l. SPIP, pengendalian/manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan) - Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintah pusat dan daerah - Analisis efektivitas penyelenggaraan SPIP dalam mendorong peningkatan kinerja K/L/D	D3				✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
c Kapabilitas APIP	- Simpulan atas kapabilitas APIP pusat dan daerah - Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kapabilitas APIP pusat dan daerah - Analisis efektivitas penyelenggaraan peran APIP K/L/D dalam mendorong ketercapaian tujuan organisasi	D3				✓
2 Pengendalian Kecurangan	- Kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh K/L/D/BU - Profil risiko kecurangan tematik atas agenda prioritas pengawasan 2022 - *Lesson learned* dari kasus riil yang ditangani BPKP - Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan - Dampak pengendalian kecurangan oleh BPKP (penyelamatan keuangan negara)	D5	✓	✓	✓	✓
a Pencegahan Kecurangan	- Hasil penguatan pencegahan kecurangan pada K/L/D/BU - Profil risiko kecurangan berdasarkan sektor dan mitigasinya - *Lesson Learned* dari kasus riil keterjadian/keberhasilan/ dampak pencegahan kecurangan oleh BPKP	D5	✓	✓	✓	✓
b Deteksi Kecurangan	- Hasil penguatan deteksi kecurangan pada K/L/D/BU - Pemanfaatan laboratorium data forensik BPKP dalam deteksi kecurangan - Analisis sektoral terkait deteksi kecurangan - *Lesson Learned* dari kasus riil keterjadian/keberhasilan/dampak deteksi kecurangan oleh BPKP	D5	✓	✓	✓	✓
c Respons Kecurangan	- Kegiatan represif BPKP atas keterjadian kecurangan - Analisis sektoral terkait kegiatan represif yang melibatkan BPKP - *Lesson Learned* dari kasus riil kegiatan represif yang melibatkan BPKP	D5	✓	✓	✓	✓
G Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	- Analisis ketepatan kebijakan penurunan kemiskinan ekstrim - Gambaran capaian penurunan kemiskinan ekstrim secara nasional - Efektivitas konvergensi penanganan kemiskinan ekstrim pada 7	D2				✓

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	Provinsi (35 Kabupaten) Prioritas - Permasalahan/hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim - Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan ekstrim					
1 Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrim	- Analisis ketepatan kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem (Keselarasan Kebijakan, Aransemen Kelembagaan, Proses Perencanaan dan Penganggaran) - Analisis atas Tata Kelola 3 Pilar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem - Permasalahan/Hambatan Utama dalam Penyelarasan Kebijakan, Aransemen Kelembagaan dan Proses Perencanaan dan Penganggaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem - Rekomendasi untuk Peningkatan Penyelarasan Kebijakan Aransemen Kelembagaan dan Proses Perencanaan dan Penganggaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem	D2	✓			
a Pilar I - Komitmen Pemerintah	- Analisis ketepatan kebijakan PILAR I - Komitmen Pemerintah dalam Program Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem - Permasalahan/Hambatan utama dalam pelaksanaan PILAR I - Komitmen Pemerintah - Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan Tata Kelola Pelaksanaan PILAR I - Komitmen Pemerintah	D2	✓			
b Pilar II - Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran	- Analisis Ketepatan kebijakan PILAR II - Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran - Analisis atas efektivitas konvergensi penanganan ekstrem pada 25 Provinsi (212 Kab/Kota) Provinsi - Permasalahan/hambatan utama dalam Pelaksanaan Pilar II - Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran - Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan Tata Kelola	D2	✓			

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	pelaksanaan Pilar II - Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran - Analisis atas Keberadaan, Kecukupan dan Kememadaian Pemutakhiran DTKS untuk penetapan sasaran untuk mengakomodir upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem termasuk Permasalahan/Hambatan Utama dan Rekomendasinya - Analisis atas Keberadaan, Kecukupan dan Kememadaian Pelaksanaan program perlindungan sosial afirmasi: lansia, penyandang disabilitas dan program tambahan untuk mengakomodir upaya penghapusan Kemiskinan Ekstrim termasuk Permasalahan/Hambatan Utama dan Rekomendasinya - Analisis atas Keberadaan, Kecukupan dan Kememadaian atas Penetapan SPM dan STPD bidang Kesehatan untuk mengakomodir Penghapusan Kemiskinan Ekstrem termasuk Permasalahan/Hambatan Utama dan Rekomendasinya					
c Pilar III - Pemantauan dan Evaluasi	- Analisis ketepatan kebijakan Pilar III - Pemantauan dan Evaluasi - Gambaran capaian penurunan kemiskinan ekstrim secara nasional - Permasalahan/hambatan utama dalam Pelaksanaan Pilar III - Pemantauan dan Evaluasi - Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dana Tata Kelola Pelaksanaan Pilar III - Pemantauan dan Evaluasi	D2	✓			
2 Penurunan Beban Pengeluaran	- Analisis ketepatan kebijakan penurunan beban pengeluaran masyarakat dengan kemiskinan ekstrim - Gambaran efektivitas kombinasi/komplementaritas bantuan terhadap penurunan beban pengeluaran - Permasalahan/hambatan utama dalam penurunan beban pengeluaran - Rekomendasi peningkatan efektivitas dan efisiensi kombinasi bantuan sosial untuk penurunan beban pengeluaran	D2			✓	
a PKH	- Gambaran kebermanfaatan PKH dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga	D2			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis Hambatan Kebermanfaatan PKH - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas PKH					
b Kartu Sembako	- Gambaran kebermanfaatan Kartu Sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga - Analisis Hambatan Kebermanfaatan Kartu Sembako - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas Kartu Sembako	D2			✓	
c Kartu Indonesia Sehat	- Gambaran kebermanfaatan Kartu Indonesia Sehat dalam mengurangi beban pengeluaran kesehatan - Analisis Hambatan Kebermanfaatan di bidang Kesehatan - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas Kartu Indonesia Sehat	D2			✓	
d Kartu Indonesia Pintar	- Gambaran kebermanfaatan Kartu Indonesia Pintar dalam mengurangi beban pengeluaran pendidikan - Analisis Hambatan Kebermanfaatan di bidang Pendidikan - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas Kartu Indonesia Pintar	D2			✓	
e Subsidi Listrik, BBM dan Gas	- Analisis *design* kebijakan subsidi listrik, BBM, dan Gas dalam penurunan kemiskinan ekstrem - Analisis hambatan kebermanfaatan di bidang Energi - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas Subsidi Listrik, BBM dan Gas - Subsidi listrik yang dinikmati oleh penduduk miskin (data DTKS)	D1			✓	
f PBI-Jamsos Ketenagakerjaan	- Analisis desain kebijakan PBI-jamsos ketenagakerjaan - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas PBI-Jamsos Ketenagakerjaan	D1			✓	
g Bantuan Subsidi Upah	- Analisis desain kebijakan pemberian bantuan subsidi upah - Gambaran kebermanfaatan Bantuan Subsidi Upah dalam mencegah menjadi Keluarga Miskin Ekstrem - Analisis Hambatan Kebermanfaatan Bantuan Subsidi Upah	D1			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas Bantuan Suubsidi Upah					
3 Peningkatan Pendapatan	- Analisis ketepatan kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat dengan kemiskinan ekstrim - Efektivitas fasilitasi bantuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin - Gambaran efektivitas bantuan pemerintah dalam membangun kapasitas dan keberlanjutan penciptaan penghasilan (produktivitas) bagi keluarga miskin - Permasalahan/hambatan utama dalam peningkatan pendapatan - Rekomendasi peningkatan efektivitas dan efisiensi kombinasi bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan	D2			✓	
a Peningkatan Akses Permodalan	- Ketepatan kebijakan mengenai perluasan akses bagi masyarakat miskin terhadap permodalan produktif - Peningkatan capaian perluasan akses terhadap modal bagi masyarakat miskin (antara lain: peningkatan jumlah keluarga miskin yang dapat mengakses permodalan, perluasan variasi akses permodalan terhadap masyarakat miskin, dll) - Gambaran efektivitas peningkatan akses permodalan dalam meningkatkan pendapatan - Analisis Hambatan implementasi peningkatan akses permodalan - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses permodalan	D2			✓	
b Peningkatan Aset Produktif	- Ketepatan kebijakan mengenai peningkatan kepemilikan/penguasaan aset produktif bagi masyarakat miskin - Capaian peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin - Gambaran efektivitas peningkatan aset produktif dalam meningkatkan pendapatan - Analisis Hambatan implementasi peningkatan akses aset produktif - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses aset produktif	D2			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
c Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	- Ketepatan kebijakan mengenai pengembangan keterampilan dan layanan usaha bagi masyarakat miskin - Capaian peningkatan pengembangan keterampilan bagi masyarakat miskin - Gambaran efektivitas pengembangan keterampilan dan layanan usaha dalam meningkatkan pendapatan - Analisis Hambatan implementasi pengembangan keterampilan dan layanan usaha - Rekomendasi untuk mendorong pengembangan keterampilan dan layanan usaha	D1			✓	
d Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	- Ketepatan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan bagi masyarakat miskin - Peningkatan jumlah masyarakat penerima manfaat - Gambaran efektivitas pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan keperantaraan dalam meningkatkan pendapatan - Analisis Hambatan implementasi Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan - Rekomendasi untuk mendorong Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	D1			✓	
e Optimalisasi Program Padat Karya	- Capaian peningkatan jangkauan program padat karya (membandingkan realisasi serapan tenaga kerja dengan target) - Gambaran efektivitas optimalisasi program padat karya dalam meningkatkan pendapatan - Analisis hambatan implementasi optimalisasi program padat karya - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses permodalan	D1			✓	
f Pengembangan Potensi Desa	- Ketepatan Kebijakan Pengembangan Potensi Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di desa - Capaian peningkatan jangkauan program Pengembangan Potensi Desa (PruDes, BUMDes, Inkubasi Inovasi Desa, dan Klustering Potensi Desa)	D3			✓	

Segmen/Klaster/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal PJ	TW1	TW2	TW3	TW4
	- Gambaran efektivitas optimalisasi program Pengembangan Potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan - Analisis hambatan implementasi optimalisasi program Pengembangan Potensi Desa - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan manfaat Pengembangan Potensi Desa bagi masyarakat miskin					
4 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat	- Analisis ketepatan kebijakan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat ditingkat Nasional - Monitoring pencapaian kineraja progam *quickwins* dan kegiatan unggulan - Gambaran Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Nasional atas Program pembangunan kesejahteraan Prov Papua dan Papua Barat - bAnalisis Hambatan Implementasi program pembangunan - Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akuntablitas Program Pembangunan Kesejahteraan di Prov Papua dan Papua Barat	D2			✓	

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-37/K/SU/2022
TENTANG
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2022

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH TAHUN 2022

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
A. Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD)							
1. Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata							
a. Peran Daerah Dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba	- Analisis desain kebijakan daerah atas DPSP dan sinkronisasinya dengan kebijakan nasional; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program pemberdayaan UMKM dan promosi wisata; - Analisis hubungan program pemberdayaan UMKM dan promosi pariwisata terhadap peningkatan kunjungan wisata; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.4	Sumatera Utara				✓

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
b. Program "Mencetak 100 Ribu *Millenial Enterpreneur* dan *Women Enterpreneur* Serta Pelaku Ekonomi Kreatif"	- Analisis kebijakan dan strategi Program "Mencetak 100 Ribu Millenial Enterpreneur dan Women Enterpreneur Serta Pelaku Ekonomi Kreatif"; - Analisis peningkatan kualitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan jumlah UMKM, peningkatan produktivitas UMKM, serta kontribusi sektor UMKM dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian regional (PDRB); - Analisis peningkatan kualitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan jumlah UMKM, peningkatan produktivitas UMKM, serta kontribusi sektor UMKM dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.4	Sumatera Barat				✓
c. Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	- Analisis kebijakan pengembangan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program pengembangan UMKM; - Analisis peningkatan produktivitas UMKM terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM dan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.4	DI Yogyakarta				✓
d. Bantuan Keuangan Khusus Dana	- Akuntabilitas keuangan dan capaian program Bantuan Keuangan Khusus (BKK);	D 3.2	DI Yogyakarta				✓

Sektor/Tema/Topik		Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
					TW1	TW2	TW3	TW4
	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	- Ketepatan sasaran program, penerima bantuan, dan penyaluran bantuan; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
e.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi	- Analisis keselarasan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pemulihan ekonomi; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program pemberdayaan masyarakat dan desa; - Analisis kolektif kinerja program PUSPA, Pemberdayaan BUMDes, Desa Berdaya, dan SINANDO dalam mendukung pemulihan ekonomi; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.4	Jawa Timur			✓	
f.	Pengelolaan Industri Pertambangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	- Analisis kebijakan atas pengelolaan industri pertambangan; - Tata kelola perizinan pertambangan dan pengendalian operasi/pengelolaan industri pertambangan; - Akuntabilitas penerimaan daerah dari industri pertambangan; - Analisis kontribusi sektor pertambangan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan pertumbuhan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Sulawesi Tenggara			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
g. Pengembangan Kawasan *Geopark* Maros Pangkep	- Analisis strategi pengembangan kawasan Geopark Maros Pangkep; - Analisis kesiapan pemerintah daerah untuk sertifikasi Global Geopark UNESCO; - Analisis kesiapan, progres, dan ketersediaan infrastruktur pendukung kawasan Geopark; - Analisis potensi peningkatan kunjungan wisata dan penerimaan daerah; - Analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian regional (PDRB); - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.4	Sulawesi Selatan		✓		
h. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung	- Analisis kebutuhan anggaran pembangunan PKB; - Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan PKB; - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam konteks pembayaran pinjaman daerah untuk PKB; - Analisis kebijakan dan strategi pengelolaan serta pemanfaatan PKB; - Analisis potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan PKB; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.4	Bali			✓	
2. Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Regional							
a. Pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT)	- Analisis kebijakan atas pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT); - Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan;	D 1.3	Riau	✓			

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis potensi peningkatan investasi, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
b. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	- Analisis kebijakan atas pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB); - Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan; - Analisis potensi peningkatan investasi, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, penyerapan komoditas dan produk (bahan baku) lokal, serta kontribusi terhadap peningkatan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.3	Jawa Tengah	✓			
c. Revitalisasi KEK Palu	- Analisis kebijakan atas revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu; - Analisis dukungan kelembagaan dan ketersediaan pendanaan untuk kebutuhan revitalisasi KEK Palu; - Akuntabilitas keuangan dan capaian progres revitalisasi KEK Palu; - Analisis potensi peningkatan investasi, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku	D 1.3	Sulawesi Tengah	✓			

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	kepentingan terkait						
d. Pengembangan Kawasan Luwu Raya	- Analisis keselarasan kebijakan pengembangan kawasan Luwu Raya dan kebutuhan pendanaan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program pengembangan kawasan; - Analisis capaian program pengembangan kawasan terhadap peningkatan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.3	Sulawesi Selatan			✓	
e. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	- Analisis kebijakan atas pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela; - Analisis penetapan dan pembagian Participating Interest (PI) kepada pemerintah daerah dan penyiapan peran BUMD pengelola; - Analisis dampak pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, peningkatan penerimaan daerah, peningkatan arus komoditas/logistik regional, dan pertumbuhan ekonomi regional PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 4.4	Maluku			✓	
f. Pengembangan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi	- Analisis keselarasan kebijakan atas program pengembangan Kota Baru Sofifi; - Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan; - Analisis kinerja Program Pengembangan Kota Baru	D 1.3	Maluku Utara		✓		

<table>
<tr><th rowspan="2">Sektor/Tema/Topik</th><th rowspan="2">Informasi yang Diharapkan</th><th rowspan="2">Rendal Substansi</th><th rowspan="2">Perwakilan Pelaksana</th><th colspan="4">Waktu Pelaporan</th></tr>
<tr><th>TW1</th><th>TW2</th><th>TW3</th><th>TW4</th></tr>
<tr><td></td><td>Sofifi dihubungkan dengan mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas birokrasi/penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan publik, serta ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah;
- Identifikasi hambatan dan permasalahan;
- Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">3. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas</td></tr>
<tr><td>a. Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional</td><td>- Analisis kebijakan dan kelembagaan penataan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional;
- Analisis kesiapan dan dukungan infrastruktur (sarana prasarana) pendukung pelabuhan pengumpan regional;
- Akuntabilitas keuangan dan capaian progres penataan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional;
- Analisis dampak penataan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional terhadap perbaikan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang serta peningkatan manfaat ekonomi;
- Identifikasi hambatan dan permasalahan;
- Rekomendasi kebijakan startegis kepada pemangku kepentingan terkait</td><td>D 1.3</td><td>Kepulauan Riau</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr>
<tr><td>b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Jakarta International Stadium</td><td>- Analisis kemampuan keuangan daerah dalam konteks pembayaran pinjaman daerah untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS);
- Analisis kebijakan dan strategi pengelolaan serta pemanfaatan JIS;
- Analisis kebutuhan pembiayaan beban operasional JIS dan potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan</td><td>D 4.5</td><td>DKI Jakarta</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	JIS; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
c. Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi Jak Lingko	- Analisis efektivitas pembentukan PT Jakarta Lingko sebagai pengelola layanan transportasi terintegrasi; - Analisis kebijakan sistem tarif terintegrasi (bundling tariff) dalam kerangka layanan transportasi terintegrasi Jak Lingko; - Analisis perbaikan kualitas layanan transportasi publik dengan peningkatan jumlah pengguna moda transportasi publik serta pengurangan kemacetan di Jakarta; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 4.2	DKI Jakarta				✓
d. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP)	- Akuntabilitas keuangan dan capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); - Analisis ketepatan sasaran program, penerima bantuan, dan penyaluran bantuan; - Analisis hubungan capaian program BSPS terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui perluasan akses rumah layak huni; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	Jawa Tengah		✓		
e. Program Konektivitas Kawasan Strategis Provinsi dengan Sentra	- Analisis desain dan kebijakan konektivitas kawasan strategis provinsi dengan sentra produksi; - Akuntabilitas keuangan dan capaian pembangunan	D 1.3	Kalimantan Timur				✓

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
Produksi	infrastruktur perhubungan; - Analisis keterhubungan/konektivitas antar wilayah dan sentra produksi dengan peningkatan arus lalu lintas orang dan barang; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
f. Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan	- Analisis strategi dan kebijakan penanganan pemukiman kumuh perkotaan; - Analisis kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral untuk program penanganan pemukiman kumuh perkotaan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program penanganan pemukiman kumuh perkotaan; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	Gorontalo			✓	
g. Pemanfaatan Bendungan di NTB	- Analisis strategi pemerintah daerah atas rehabilitasi dan revitalisasi serta pemanfaatan bendungan di NTB; - Akuntabilitas keuangan dan capaian progres rehabilitasi serta revitalisasi bendungan; - Analisis pemanfaatan bendungan untuk irigasi, perikanan, pembangkit listrik, pariwisata, dan penanggulangan bencana; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.3	NTB				✓

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
h. Optimalisasi Tol Laut di Provinsi Maluku Utara	- Analisis kebijakan Optimalisasi Tol Laut di Provinsi Maluku Utara; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Optimalisasi Tol Laut; - Analisis manfaat program Optimalisasi Tol Laut terhadap stabilitas harga dan peningkatan ekspor antar daerah di Provinsi Maluku Utara; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.3	Maluku Utara			✓	
i. Sengketa Tanah Adat dan Hambatan Kelancaran Pembangunan Papua	- Analisis permasalahan sengketa tanah adat dan klaim lahan oleh masyarakat adat; - Analisis nilai ekonomi penyelesaian sengketa tanah adat dalam pembangunan di Papua; - Analisis efektivitas forum koordinasi lintas sektoral dalam penyelesaian sengketa tanah adat; - Analisis mitigasi konflik dan pendekatan kolaboratif pembangunan dengan masyarakat adat; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 5.4	Papua			✓	
j. Pengelolaan Aset Pasca Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021	- Analisis strategi pengelolaan dan pemanfaatan aset pasca penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021, terutama dalam konteks benchmarking pengelolaan aset pasca penyelenggaraan pesta olahraga nasional/regional/internasional; - Percepatan penyelesaian strategi pengelolaan aset pasca penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 dihubungkan dengan potensi ekonomi biaya tinggi (beban pemeliharaan) yang harus	D 3.1	Papua	✓			

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	dihadapi pemerintah daerah; - Percepatan proses hibah atau transfer kepemilikan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
4. Pengembangan Sumber daya Manusia							
a. Pemberdayaan Suku Anak Dalam	- Analisis kebijakan atas program Pemberdayaan Suku Anak Dalam; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program Pemberdayaan Suku Anak Dalam; - Analisis ketepatan penyaluran bantuan dan dampak bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup Suku Anak Dalam; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	Jambi				✓
b. Penanganan Kesenjangan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Antara Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten	- Analisis strategi dan kebijakan Provinsi Banten dalam penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan; - Analisis ketepatan dan proporsionalitas program dan anggaran pendidikan untuk pengurangan kesenjangan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus; - Analisis dampak program penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan terhadap peningkatan capaian APM dan APK serta	D 2.4	Banten			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	Indeks Pembangunan Manusia; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
c. Penanganan Kesenjangan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Antara Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten	- Analisis strategi dan kebijakan Provinsi Banten dalam penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan; - Analisis ketepatan dan proporsionalitas program dan anggaran kesehatan untuk pengurangan kesenjangan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat; - Analisis dampak program penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap peningkatan capaian Angka Harapan Hidup; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.4	Banten			✓	
d. Peningkatan Capaian Indikator Indeks Desa Membangun di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	- Analisis pemenuhan dan permasalahan pemenuhan dimensi dan indikator IDM berdasarkan kondisi terkini; - Analisis keselarasan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan IDM; - Analisis ketepatan program dan alokasi anggaran pemerintah dalam mendukung pemenuhan dimensi dan indikator IDM; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku	D 3.3	Kalimantan Barat			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	kepentingan terkait						
e. Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Utara	- Analisis ketepatan dan keselarasan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara; - Akuntabilitas keuangan atas program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; - Analisis capaian kinerja program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Utara; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	Sulawesi Utara		✓		
f. Program Pengembangan Kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Provinsi Papua Barat	- Analisis kebijakan atas pengembangan Kawasan KAT; - Akuntabilitas dan aksesibilitas program pendidikan, kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial kepada KAT; - Analisis efektivitas program pengembangan Kawasan KAT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.5	Papua Barat			✓	
5. Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup							
a. Program Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	- Analisis kebijakan penanganan karhutla dalam aspek pencegahan (early warning system), tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi); - Analisis kesiapan kelembagaan, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran dalam rangka	D 2.3	Sumatera Selatan		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	penanganan karhutla; - Analisis capaian program penanganan karhutla; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
b. Program Normalisasi Sungai Kurau	- Analisis desain program normalisasi Sungai Kurau; - Analisis kelembagaan, hubungan koordinasi antar stakeholders, dan kecukupan anggaran; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program normalisasi Sungai Kurau; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Kepulauan Bangka Belitung			✓	
c. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum	- Analisis keselarasan kebijakan dan strategi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum; - Analisis kelembagaan, hubungan koordinasi antar stakeholders, dan kecukupan anggaran; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum; - Analisis peningkatan kuantitas dan kualitas air, peningkatan kondisi dan fungsi DAS, serta dukungan ketahanan bencana; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Jawa Barat			✓	
d. Perizinan Lahan untuk Pembangunan Daerah	- Analisis tata kelola perizinan lahan; - Analisis pemanfaatan izin lahan sesuai peruntukan	D 1.3	Kalimantan Tengah		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
Berkelanjutan	serta penegakan hukum; - Analisis ketepatan pemanfaatan izin lahan dengan pengendalian aktivitas ekonomi dan dampak kerusakan lingkungan; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
e. Penanganan Bantingsorkarhutla (Bencana Alam Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan)	- Analisis kebijakan Penanganan Bantingsorkarhutla (Bencana Alam Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan) dalam aspek pencegahan, tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi); - Analisis kesiapan kelembagaan, sarana prasarana dan ketersediaan anggaran dalam rangka Penanganan Bantingsorkarhutla; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	Kalimantan Tengah		✓		
f. Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	- Analisis keselarasan tata kelola perizinan tambang dan kebijakan penanganan tambang ilegal; - Akuntabilitas pemenuhan kewajiban dan jaminan reklamasi pascatambang bagi Pemegang IUP; - Analisis implementasi kewajiban reklamasi pascatambang serta dampak kerusakan lingkungan dan penanganan bencana; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Kalimantan Selatan			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
g. Program Penanganan Krisis/Defisit Air Baku	- Analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber air baku; - Analisis pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku dan dukungan pendanaan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program; - Analisis pemanfaatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Kalimantan Timur			✓	
h. Program Pemulihan Pasca Bencana Gempa Tahun 2018	- Analisis kebutuhan pendanaan serta progres rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana; - Analisis ketepatan dan validitas data penerima bantuan; - Akuntabilitas penyaluran bantuan dan progres relokasi korban bencana; - Analisis kebijakan pemulihan ekonomi pascabencana - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	Sulawesi Tengah		✓		
i. Penanganan Bencana Angin Siklon Seroja	- Analisis kebutuhan pendanaan serta progres rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana; - Akuntabilitas pengelolaan dana penanganan bencana serta risiko fraud; - Analisis strategi relokasi korban bencana; - Analisis kebijakan pemulihan ekonomi pascabencana; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 2.3	NTT		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
6. Kelautan dan Perikanan							
a. Program Pengembangan Perikanan	- Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program pengembangan perikanan; - Peningkatan produktivitas perikanan dan supply ikan regional; - Analisis kesejahteraan nelayan melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan/atau Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Aceh			✓	
b. Pengelolaan dan Produktivitas Perikanan	- Analisis atas desain kebijakan program pengelolaan dan produktivitas perikanan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program pengelolaan dan produktivitas perikanan; - Analisis peningkatan produktivitas perikanan; - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regioan (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan peningkatan produktivitas perikanan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Sumatera Barat				✓
c. Pengelolaan dan Produktivitas Perikanan	- Analisis atas desain kebijakan program peningkatan produktivitas perikanan; - Analisis tata kelola perizinan perikanan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program pengelolaan perikanan; - Analisis peningkatan produktivitas perikanan;	D 1.2	Kepulauan Riau			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
d. Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Analisis atas desain kebijakan program pengembangan perikanan; - Akuntabilitas capaian kinerja program pengembangan perikanan; - Analisis peningkatan produktivitas perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN); - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Kepulauan Bangka Belitung			✓	
e. Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Analisis atas desain kebijakan program peningkatan produktivitas perikanan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program peningkatan produktivitas perikanan; - Analisis penurunan jumlah nelayan terhadap penurunan produktivitas perikanan; - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Lampung			✓	
f. Rantai Nilai Produksi Garam di Jawa Timur	- Analisis kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola industri garam di Jawa Timur;	D 1.2	Jawa Timur		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis ketepatan program dalam mendukung proses produksi garam, penjaminan mutu hasil produksi, serta rantai distribusi dan pemasaran garam rakyat; - Analisis ketersediaan dan kecukupan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung industri garam; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program peningkatan produksi garam; - Analisis peningkatan produksi garam terhadap peningkatan pendapatan petani garam, supply garam nasional dan pengurangan impor garam; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
g. Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Produktivitas Perikanan; - Analisis peningkatan produktivitas perikanan; - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan peningkatan produktivitas perikanan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Sulawesi Barat			✓	
h. Pengelolaan Industri Perikanan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	- Analisis dukungan kebijakan daerah terhadap Pengelolaan Industri Perikanan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Pengelolaan Industri Perikanan; - Peningkatan produktivitas perikanan; - Analisis atas supply ikan regional dan sistem logistik	D 1.2	Sulawesi Tenggara			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	ikan nasional; - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
i. Industrialisasi Garam di NTB	- Analisis kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola industri garam di NTB; - Analisis ketepatan program dalam mendukung proses produksi garam, penjaminan mutu hasil produksi, serta rantai distribusi dan pemasaran garam rakyat; - Analisis ketersediaan dan kecukupan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung industri garam; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program peningkatan produksi garam; - Analisis peningkatan produksi garam terhadap peningkatan pendapatan petani garam, supply garam nasional, dan pengurangan impor garam; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	NTB		✓		
j. Pengembangan Industri Perikanan Papua Barat	- Analisis efektivitas proses perizinan dan industrialisasi perikanan di Papua Barat; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Pengembangan Industri Perikanan; - Analisis peningkatan produktivitas perikanan; - Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB);	D 1.2	Papua Barat			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	- Identifikasi hambatan dan permasalahan pengembangan industri perikanan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
7. Pertanian dan Perkebunan							
a. Peningkatan Produktivitas Pertanian	- Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program peningkatan produktivitas pertanian; - Analisis peningkatan produktivitas pertanian; - Analisis kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan peningkatan produktivitas pertanian; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Aceh			✓	
b. Implementasi Kebijakan Sawit Berkelanjutan (KSB)	- Analisis kebijakan sawit berkelanjutan dan peremajaan sawit rakyat; - Analisis tata kelola perizinan, pengelolaan perkebunan, dan perniagaan sawit; - Analisis hubungan produksi sawit terhadap ketersediaan dan distribusi Crude Palm Oil (CPO); - Analisis kontribusi sektor perkebunan sawit terhadap penerimaan daerah dan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Sumatera Utara		✓		
c. Peningkatan Produktivitas Pertanian	- Analisis keselarasan kebijakan dan kelembagaan untuk peningkatan produktivitas pertanian; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program	D 1.2	Riau			✓	

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	peningkatan produktivitas pertanian: - Analisis peningkatan produktivitas pertanian terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian regional; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
d. Peningkatan Produktivitas Pertanian	- Analisis desain kebijakan peningkatan produktivitas pertanian; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Produktivitas Pertanian; - Analisis alih fungsi lahan pertanian dengan penurunan produktivitas; - Analisis kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Jambi				✓
e. Program Revitalisasi Kelapa Sawit	- Analisis kebijakan program revitalisasi kelapa sawit; - Analisis tata kelola perizinan, pengelolaan perkebunan dan perniagaan kelapa sawit; - Analisis kinerja replanting sawit dihubungkan dengan peningkatan produksi sawit; - Analisis hubungan produksi sawit terhadap ketersediaan dan distribusi Crude Palm Oil (CPO); - Analisis kontribusi sektor perkebunan sawit terhadap penerimaan daerah dan perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan;	D 1.2	Bengkulu		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	- Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
f. Program Peningkatan Produktivitas Pertanian dalam Mendukung Kedaulatan Pangan	- Analisis kebijakan kedaulatan pangan daerah; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program Peningkatan Produktivitas Pertanian; - Analisis produktivitas pertanian dan kelancaran distribusi logistik untuk pemenuhan cadangan beras provinsi; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Sumatera Selatan				✓
g. Peningkatan Produktivitas Pertanian	- Analisis desain kebijakan program peningkatan produktivitas pertanian; - Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Produktivitas Pertanian; - Analisis alih lahan pertanian dengan penurunan produktivitas; - Analisis kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan peningkatan produktivitas pertanian; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Lampung				✓
h. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian untuk Membangun Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	- Analisis Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan Barat; - Analisis Ketepatan Sasaran Program dan Kecukupan dukungan Pendanaan; - Analisis peningkatan keragaman potensi komoditas pangan dalam mendukung ketahanan pangan	D 1.2	Kalimantan Barat		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	wilayah; - Analisis peningkatan potensi produktivitas pertanian dalam mendukung ketahanan pangan wilayah; - Analisis ketersediaan komoditas pangan dan kestabilan harga komoditas pangan dalam konteks peta kerentanan dan ketahanan pangan wilayah; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
i. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dalam Program Ketahanan Pangan Daerah	- Akuntabilitas keuangan dan capaian program Peningkatan Kesejahteraan Petani; - Analisis kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP); - Analisis hubungan peningkatan kesejahteraan petani dengan produktivitas pertanian; - Identifikasi hambatan dan permasalahan' - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Kalimantan Utara			✓	
j. Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi	- Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi; - Analisis efektivitas program Pangan Asal Hewan (PAH) Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dalam mendukung program Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi; - Analisis kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Gorontalo		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
k. Peningkatan Produktivitas Pertanian	- Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Produksi Pertanian; - Analisis peningkatan produktivitas pertanian; - Analisis kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian regional (PDRB); - Identifikasi hambatan dan permasalahan peningkatan produksi pertanian; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Sulawesi Barat			✓	
l. Peningkatan Produktivitas Tanaman Rempah (Pala dan Cengkih)	- Analisis keselarasan kebijakan dan kelembagaan peningkatan produktivitas komoditas unggulan pala dan cengkih; - Analisis ketepatan program dan dukungan pendanaan; - Akuntabilitas keuangan dan capaian program peningkatan produktivitas komoditas unggulan; - Analisis dampak revitalisasi perkebunan terhadap peningkatan produktivitas pala dan cengkih; - Analisis peningkatan produktivitas pala dan cengkih terhadap potensi/peluang ekspor komoditas unggulan; - Analisis tata kelola dan hambatan ekspor komoditas unggulan; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 1.2	Maluku		✓		
8. Pengelolaan dan Optimaliasi PAD							
a. Pengelolaan PAD BPHTB atas HGU	- Analisis tata kelola PAD BPHTB atas HGU Perkebunan;	D 3.1	Bengkulu		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
Perkebunan	- Uji potensi PAD BPHTB atas HGU Perkebunan; - Realisasi capaian PAD BPHTB atas HGU Perkebunan; - Analisis kontribusi PAD BPHTB atas HGU Perkebunan terhadap penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
b. Optimalisasi PAD Sektor Jalan Tol di Jawa Barat	- Analisis tata kelola PAD Sektor Jalan Tol; - Uji potensi PAD Sektor Jalan Tol; - Realisasi capaian PAD Sektor Jalan Tol; - Analisis kontribusi PAD Sektor Jalan Tol terhadap penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 3.1	Jawa Barat		✓		
c. Optimalisasi PAD Pajak Air Permukaan	- Analisis tata kelola Pajak Air Permukaan; - Uji potensi Pajak Air Permukaan; - Realisasi capaian Pajak Air Permukaan; - Analisis kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 3.1	Kalimantan Selatan		✓		
d. Pengelolaan PAD Pajak Sarang Burung Walet	- Analisis tata kelola Pajak Sarang Burung Walet; - Uji potensi Pajak Sarang Burung Walet; - Realisasi capaian Pajak Sarang Burung Walet;	D 3.1	Kalimantan Utara		✓		

Sektor/Tema/Topik	Informasi yang Diharapkan	Rendal Substansi	Perwakilan Pelaksana	Waktu Pelaporan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	- Analisis kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait						
e. Pengelolaan PAD Pajak Hotel Terapung	- Analisis tata kelola Pajak Hotel Terapung; - Uji potensi Pajak Hotel Terapung; - Realisasi capaian Pajak Hotel Terapung; - Analisis kontribusi Pajak Hotel Terapung terhadap penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal; - Identifikasi hambatan dan permasalahan; - Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait	D 3.1	NTT		✓		

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana